

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PEREDARAN GULA  
TANPA STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KOTA PADANG**

**TESIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum*



**Oleh:**

**FEBDORI ARMANSYAH**  
**1820112061**

**Komisi Pembimbing:**

- 1. Dr. YUSLIM, SH., MH**
- 2. Dr. HENGKI ANDORA S.H., LL.M**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2022**

## **PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PEREDARAN GULA TANPA STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KOTA PADANG**

**Febdori Armansyah, NIM 1820112061, 96 Halaman, Program Magister Ilmu  
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2022**

### **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan pedoman hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keselamatan dan keamanan bagi konsumen dan pelaku usaha. Pencantuman Label Standar Nasional Indonesia pada produk pelaku usaha merupakan bentuk dari telah terpenuhinya persyaratan teknis dan telah memenuhi standarisasi penilaian kesesuaian pada produk pelaku usaha yang diharapkan memberikan manfaat bagi konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Banyaknya produk yang belum mencantumkan label SNI pada produknya merupakan pelanggaran administrasi yang seharusnya diselesaikan secara administrasi pula bukan secara pidana. Sanksi administrasi bersifat primum remedium dibandingkan sanksi pidana yang merupakan ultimum remedium dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi. Pada penelitian ini penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum dalam menerapkan Sanksi Administratif terhadap Peredaran Gula tanpa Standar Nasional Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? 2) Bagaimana Penerapan Sanksi Administratif dalam Peredaran Gula Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penulis berdasarkan hasil penelitian menemukan: 1) Penegakan hukum dalam pelanggaran administratif haruslah diberikan sanksi administratif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya dan juga disesuaikan dengan pengulangan pelanggaran yang dilakukan. 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perdagangan merupakan pejabat yang diberikan kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif terutama pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perdagangan.

ws

Kata Kunci: Sanksi Adminstratif, SNI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

# **IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN THE CIRCULATION OF SUGAR WITHOUT INDONESIAN NATIONAL STANDARDS IN THE CITY OF PADANG**

**Febdori Armansyah, NIM 1820112061, 96 Pages, Master of Laws Program,  
Faculty of Law, Andalas University 2022**

## ***ABSTRAK***

*Law Number. 7 of 2014 concerning Trade is a legal guideline for business actors in running their business. Arrangements in Law Number. 7 of 2014 concerning Trade is intended to provide comfort, safety and security for consumers and business actors. The inclusion of the Indonesian National Standard Label on the business actor's products is a form of fulfilling the technical requirements and fulfilling the standards based on conformity assessment of the business actor's products which are expected to provide benefits for consumers in using the product. The large number of products that do not include the SNI label on their products is an administrative violation that should be resolved administratively and not criminally. Administrative sanctions are primum remedium in nature compared to criminal sanctions which are ultimum remedium in law enforcement against administrative violations. In this study, the authors found the following problem formulations: 1) How Are Law Enforcement Arrangements in applying Administrative Sanctions to the Circulation of Sugar without Indonesian National Standards in Indonesian Legislation? 2) How is Administrative Sanctions Implemented in the Distribution of Sugar Without Indonesian National Standards in the City of Padang? This study uses a normative juridical research type. Based on the results of the research, the authors found: 1) Law enforcement in administrative violations must be given administrative sanctions according to the violations committed and also adjusted to the repetition of the violations committed. 2) Civil Servant Investigators at the Trade Service are officials who are given the authority to enforce the law against administrative violations, especially violations of the provisions contained in the Trade Law.*

Keywords: Adminstrative Sanctions, Indonesian National Standards, Civil Servant

Investigators